



Tersedia online di: <http://ejournal-balitbang.kkp.go.id/index.php/jkpi>

e-mail: jkpi.puslitbangkan@gmail.com

JURNAL KEBIJAKAN PERIKANAN INDONESIA

Volume 18 Nomor 1 Mei 2026

p-ISSN: 1979-6366

e-ISSN: 2502-6550

Akreditasi Ditjen DIKTIRISTEK Nomor: 10/C/C3/DT.05.00/2025



TINJAUAN HISTORIS PERKEMBANGAN KEBIJAKAN PENGELOLAAN PERIKANAN SKALA KECIL DI PROVINSI SULAWESI TENGGARA

HISTORICAL REVIEW OF SMALL-SCALE FISHERIES MANAGEMENT POLICY DEVELOPMENTS IN SOUTHEAST SULAWESI PROVINCE

Muhamad Ariston^{*1}, Luky Adrianto², Dietrich G Bengen³ dan Handoko Adisusanto⁴

¹Program Studi Pengelolaan Pesisir dan Lautan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Institut Pertanian, Bogor
Jl. Raya Darmaga, Gedung Sekolah Pascasarjana IPB, Kampus IPB Darmaga Bogor 16680 - Jawa Barat

²Departemen Manajemen Sumberdaya Perairan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Institut Pertanian Bogor
Jl. Raya Darmaga, Gedung Sekolah Pascasarjana IPB, Kampus IPB Darmaga Bogor 16680 - Jawa Barat

³Departemen Ilmu dan Teknologi Kelautan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Institut Pertanian Bogor
Jl. Raya Darmaga, Gedung Sekolah Pascasarjana IPB, Kampus IPB Darmaga Bogor 16680 - Jawa Barat

⁴ Arafuru and Timur Sea Ecosystem Actions Program (ATSEA)
Jl. Mertasari No. 140 Sidakarya, Denpasar 80224, Bali, Indonesia

Teregistrasi I tanggal: 16 Februari 2024; Diterima setelah perbaikan tanggal: 23 September 2024;

Disetujui terbit tanggal: 25 Mei 2026

ABSTRAK

Terbatasnya pemahaman tentang sejarah perkembangan kebijakan perikanan skala kecil di Provinsi Sulawesi Tenggara mendorong dilakukannya penelitian ini. Tinjauan historis ini menguraikan evolusi kebijakan pengelolaan perikanan skala kecil di Provinsi Sulawesi Tenggara dari masa ke masa. Sejak masa Orde Lama, Orde Baru hingga masa Reformasi. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang sejarah perkembangan kebijakan perikanan skala kecil sejak berdirinya Provinsi Sulawesi Tenggara, mulai dari masa pemerintahan gubernur pada masa Orde Lama dan Orde Baru sampai Era Reformasi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis isi yang digunakan untuk menggali/membedah tulisan atau muatan-muatan teks komunikasi yang manifest atau bersifat nyata. Hasil analisis menunjukkan bahwa terjadi evolusi signifikan dalam pendekatan kebijakan terhadap sektor perikanan. Pada masa Orde Lama, politik dan ekonomi merupakan hambatan utama terhadap implementasi kebijakan di semua sektor, termasuk sektor perikanan. Sementara pada masa Orde Baru, pembangunan ekonomi menjadi fokus utama dengan peningkatan pada sektor infrastruktur dan sektor ekonomi, termasuk sektor perikanan. Era Reformasi terjadi pergeseran fokus ke pertumbuhan dan produksi perikanan dengan investasi dalam industri unggulan seperti rumput laut dan pengolahan hasil perikanan. Penelitian ini memotret terkait dengan Peraturan Gubernur Nomor 36 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Akses Area Perikanan (PAAP) yang mendorong partisipasi masyarakat dalam pengelolaan perikanan serta meningkatkan kesadaran akan pentingnya konservasi lingkungan.

KATA KUNCI: Kebijakan perikanan skala kecil; evolusi kebijakan; partisipasi masyarakat dan konservasi lingkungan

ABSTRACT

The limited understanding of the historical development of small-scale fisheries policy in Southeast Sulawesi Province has prompted this research. This historical review delineates the evolution of small-scale fisheries management policies in Southeast Sulawesi over time, spanning from the Old Order era, through the New Order era, to the Reform Era. This study aims to gain a deeper understanding of the historical development of small-scale fisheries policy since the establishment of Southeast Sulawesi Province, starting from the gubernatorial administrations during the Old Order, New Order, up to the Reform Era. The method used in this research is content analysis, which is employed to explore and dissect the content or manifest meanings of written texts or communications. The analysis results demonstrate a significant evolution in policy approaches toward the fisheries

Korespondensi penulis:

e-mail: aristonmuhamad@apps.ipb.ac.id

DOI: <http://dx.doi.org/10.15578/jkpi.18.1.2026.19-26>

Copyright © 2026, Jurnal Kebijakan Perikanan Indonesia (JKPI)

sector. During the Old Order era, political and economic obstacles hindered policy implementation across all sectors, including fisheries. Meanwhile, during the New Order era, economic development became the primary focus, leading to advancements in infrastructure and economic sectors, including fisheries. The Reform Era saw a shift in focus towards fisheries growth and production, with investments in flagship industries such as seaweed cultivation and fish processing. This research also captures the context of Governor Regulation Number 36 of 2019 concerning the Management of Fisheries Access Areas (PAAP), which encourages community participation in fisheries management and raises awareness of the importance of environmental conservation.

KEYWORDS: *Small-scale fisheries policy; policy evolution; community participation and environmental conservation*

PENDAHULUAN

Indonesia, sebagai negara kepulauan yang kaya akan sumber daya laut, memiliki sektor perikanan yang sangat penting dalam perekonomiannya (Dahuri, 2002; Fauzi, 2010; Fauziyah *et al.*, 2014; Nurlina, 2018). Sektor ini tidak hanya memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama di daerah pesisir (Adrianto, 2005; Bappenas, 2014). Studi-studi sebelumnya sejak tahun 1990-an menunjukkan bahwa perikanan, khususnya perikanan tangkap, mampu menciptakan lapangan kerja dan bertindak sebagai “jaring pengaman” saat sumber penghasilan lain tidak tersedia atau gagal (Cunningham, 1993; Machena & Kwaramba, 1997; Bene & Tewfik, 2001; Bene *et al.*, 2007). Namun, potensi besar ini juga diiringi dengan tantangan dalam pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan (Kusdiantoro *et al.*, 2019; Kusdiantoro *et al.*, 2020).

Sulawesi Tenggara, sebagai salah satu provinsi dengan potensi perikanan yang signifikan, memiliki karakteristik geografis yang terdiri dari daratan utama dan pulau-pulau kecil, serta sejarah panjang hubungan masyarakat lokal dengan laut dan sumber daya perikanan. Terbatasnya pemahaman tentang sejarah kebijakan perikanan skala kecil di Sulawesi Tenggara menjadi hambatan dalam pengembangan kebijakan yang efektif dan berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang sejarah perkembangan kebijakan perikanan skala kecil di Provinsi Sulawesi Tenggara, dari masa pemerintahan gubernur pada Orde Lama, Orde Baru, hingga Era Reformasi. Penelitian ini penting karena minimnya dokumentasi dan penelitian lokal yang komprehensif terkait kebijakan perikanan skala kecil di Sulawesi Tenggara. Penelitian ini didasarkan pada konsep keberlanjutan dalam pengelolaan sumber daya perikanan dan pendekatan historis dalam memahami evolusi kebijakan. Kajian teoritis akan melibatkan analisis kebijakan perikanan skala kecil dengan melihat aspek yuridis, sosial-ekologi, dan politik yang telah diteliti sebelumnya

(Mudzakir, 2011; Hidayat, 2013; Pinkerton, 2015; Purwatia *et al.*, 2017; Gian & Akim, 2020; Vatria, 2021; Raazy, 2023). Selanjutnya, penelitian ini akan fokus pada dokumentasi dan analisis kebijakan perikanan skala kecil di Sulawesi Tenggara dari masa Orde Lama hingga masa Reformasi. Data yang digunakan meliputi dokumen regulasi, laporan penelitian, publikasi jurnal, serta media informasi lainnya. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan historis dengan analisis konten yang bertujuan untuk memaparkan evolusi kebijakan perikanan skala kecil di Sulawesi Tenggara berdasarkan sumber-sumber data yang tersedia. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kebijakan perikanan skala kecil yang lebih efektif dan berkelanjutan di Sulawesi Tenggara. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi penting bagi peneliti dan praktisi di bidang perikanan dalam memahami perkembangan kebijakan di wilayah tersebut, serta memberikan dasar bagi penelitian lanjutan di bidang ini.

PENGUMPULAN DATA DAN ANALISIS DATA

Data yang di kumpulkan dari penelitian ini adalah berupa data sekunder yang diperoleh dari dokumen tertulis berupa dokumen regulasi atau kebijakan, laporan penelitian, publikasi jurnal atau laporan penelitian, media informasi baik non elektronik maupun media elektronik dan literatur lainnya yang mendukung. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis konten (content analysis), (Tonny, 2009) menyatakan bahwa pendekatan content analysis digunakan untuk menggali/membedah tulisan atau muatan-muatan teks komunikasi yang manifest atau bersifat nyata. Data yang diperoleh berupa dokumen regulasi atau kebijakan, laporan penelitian, publikasi jurnal, media informasi non-elektronik maupun elektronik, serta literatur lainnya diseleksi dan diekstraksi. Proses ini bertujuan untuk mendapatkan informasi yang penting dan akurat terkait tinjauan historis kebijakan pengelolaan perikanan skala kecil di Sulawesi Tenggara.

Bahasan

Kebijakan Perikanan Masa Kolonial dan pendudukan Jepang

Kebijakan perikanan pada masa kolonial Belanda di Indonesia, dicanangkan pertama kali pada tahun 1901 oleh pemerintah Hindia Belanda. kebijakan ini bertujuan untuk mengelola sektor perikanan dengan tujuan mengentaskan kemiskinan lokal (Widodo, 2011). Pada tahun 1914, pemerintah kolonial Belanda mendirikan Bagian Perikanan atau Afdeeling Visserij dengan tujuan untuk melakukan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan pengembangan sektor perikanan. Seiring berjalannya waktu, Belanda mereorganisasi Bagian Perikanan tersebut dan membentuk Lembaga Perikanan Laut atau Institut Voor de Zeevisserij. Pada masa pendudukan Jepang, Lembaga Perikanan Laut yang sebelumnya bernama Afdeeling Visserij mengalami perubahan nama menjadi Jawatan Perikanan Laut atau Kaken Gyogo Kenkyu Sao. Selain itu, Jepang juga membentuk perkumpulan nelayan dalam wadah Koperasi Perikanan Laut atau Gyogo Kumiai. Namun, pada saat itu, tugas utama dari Jawatan dan Koperasi Perikanan Laut lebih difokuskan pada pemenuhan kebutuhan logistik armada perang Jepang. Kegiatan yang dilakukan lebih bersifat instrumental dalam rangka mendukung kepentingan militer Jepang dan tidak memperhatikan pengembangan sektor perikanan secara keseluruhan.

Kebijakan Perikanan Masa Orde Lama, Orde Baru dan Reformasi

Setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, lembaga perikanan yang didirikan pada masa pemerintahan kolonial diubah menjadi Yayasan Perikanan Laut di bawah Kementerian Pertanian. Visi Presiden Soekarno tentang "berdikari" memberikan kesempatan bagi sektor perikanan untuk berkembang. Salah satu bentuk nyata dari visi ini adalah menghentikan impor komoditas, termasuk ikan. Kaum nelayan oleh Bung Karno dijuluki sebagai salah satu pilar kemandirian ekonomi negara atau "guru revolusi". Pengakuan pemerintah tertinggi untuk kaum nelayan pada saat itu diumumkan dengan menetapkan tanggal 6 April sebagai Hari Nelayan Nasional pada tahun 1961. Pada era Orde Lama, beberapa program perikanan nasional telah diperkenalkan untuk mendorong pengembangan sektor perikanan di Indonesia. Salah satunya adalah pembentukan Departemen Perikanan pada tahun 1964. Pada masa pemerintahan Orde Baru di tahun 1970-an, program Revolusi Biru dicanangkan dengan tujuan untuk meningkatkan kapasitas tangkapan ikan nelayan tradisional dengan cara memodernisasi peralatan penangkap ikan dan memodernisasi perahu.

Data statistik dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa pada tahun 1970, jumlah ikan laut yang berhasil ditangkap mencapai 807.000 ton, sementara pada tahun 1980, nelayan Indonesia mampu menangkap sekitar 1,4 juta ton ikan laut. Hal ini menunjukkan peningkatan produktivitas nelayan sebesar 42 persen dalam kurun waktu satu dekade. Dalam rangka meningkatkan tangkapan sumber daya laut di era 1980-an, pemerintah Orde Baru mengundang pelaku perikanan industri berskala besar. Kebijakan ini ditandai dengan kehadiran kapal-kapal asing yang melakukan penangkapan ikan di perairan Indonesia sebagai bagian dari kebijakan penanaman modal asing (PMA) pada masa pemerintahan Presiden Soeharto. Kebijakan ini dilakukan karena potensi perikanan di zona ekonomi eksklusif (ZEE) Indonesia masih belum dimanfaatkan secara maksimal. Nelayan Indonesia yang mayoritas adalah nelayan tradisional baru memanfaatkan 1 persen dari potensi perikanan yang ada. Oleh karena itu, kehadiran nelayan pelaku perikanan industri diharapkan dapat meningkatkan pemanfaatan potensi perikanan di Indonesia. Sejak era Reformasi hingga saat ini, pemerintah telah melakukan sejumlah kebijakan untuk mengelola dan menggali potensi perikanan di Indonesia. Beberapa kebijakan tersebut mencakup larangan kapal asing dan bekas negara asing menangkap ikan di perairan Indonesia, larangan penggunaan alat tangkap cantrang, dan larangan ekspor benur. Namun, jika dilihat dari corak kebijakan yang dijalankan, tampaknya fokus pengelolaan perikanan masih terbatas pada skala mikro atau sektoral. Sebagian besar program dan kebijakan yang dilakukan masih berupa upaya membangun fasilitas perikanan, memberikan bantuan modal atau kapal, dan mengatur ketimpangan hasil perikanan antardaerah.

Kebijakan Perikanan di Provinsi Sulawesi Tenggara

Sejak terbentuknya Provinsi Sulawesi Tenggara berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 2 Tahun 1964 juncto Undang-Undang No. 13 Tahun 1963 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Tenggara (ANRI, 2007), kebijakan perikanan secara umum dapat dipahami melalui program kerja yang diimplementasikan oleh gubernur dari masa kepemimpinan gubernur pertama hingga saat ini.

Kebijakan Perikanan Gubernur Sulawesi Tenggara era Orde Lama

Kebijakan Gubernur Sulawesi Tenggara era Orde Lama dimulai sejak terbentuknya Provinsi Sulawesi

Tenggara dan diawali dengan pemerintahan gubernur pertama (J. Wayong, 1964–1965) sampai masa pemerintahan gubernur kedua (Laode Hadi, 1965 – 1966). Secara umum, kebijakan hanya difokuskan kepada persiapan infrastruktur pemerintahan. Hal ini disebabkan karena pertumbuhan ekonomi melambat, kekacauan didalam negeri akibat pemberontakan serta penurunan daya beli masyarakat. Hal tersebut menyebabkan kebijakan pembangunan, termasuk kebijakan perikanan, tidak menjadi prioritas.

Pemerintahan Gubernur pertama (J wayong 1964-1965)

Selama masa pemerintahan gubernur pertama sejak terbentuknya Provinsi Sulawesi Tenggara, ekonomi Indonesia mengalami depresi. Hal ini ditandai dengan penurunan daya beli masyarakat, dengan inflasi mencapai 60%, serta gangguan keamanan dalam negeri seperti pemberontakan DI/ TII di Sulawesi Selatan dan Tenggara. Akibat masa jabatan yang singkat, strategi Gubernur J. Wayong hanya difokuskan pada persiapan infrastruktur pemerintah dan persiapan gubernur definitif, (Abadi & Hayat, 2014). Dengan kondisi tersebut, kebijakan pembangunan, terutama di sektor perikanan, tidak menjadi prioritas bagi pemerintah yang baru terbentuk di Provinsi Sulawesi Tenggara.

Pemerintahan Gubernur Laode Hadi 1965 - 1966

Sebagaimana halnya dengan Gubernur pertama Provinsi Sulawesi Tenggara, La Ode Hadi mengalami kesulitan dalam menyusun strategi pembangunan di Provinsi Sulawesi Tenggara karena masa jabatannya yang singkat dan situasi politik yang krisis. Selain itu, kondisi ekonomi dan keuangan yang memburuk juga menjadi kendala. Dalam masa pemerintahannya, pembangunan ekonomi mengalami kemajuan yang lambat karena dampak dari krisis politik, ekonomi, dan keuangan yang terjadi. (Abadi & Hayat, 2014). Situasi ini mengakibatkan seluruh strategi kebijakan yang hendak dilakukan, termasuk sektor perikanan, belum dapat diterapkan dan diimplementasikan ke dalam kebijakan yang strategis.

Kebijakan Perikanan Gubernur Sulawesi Tenggara era Orde Baru

Kebijakan Gubernur Sulawesi Tenggara era Orde Baru mulai mengarah pada pembangunan dan diarahkan pada pertumbuhan ekonomi masyarakat. Seiring dengan stabilitas keamanan dan program pemerintah Orde Baru dengan dicanangkannya program pembangunan Orde Baru dengan Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita), program

pembangunan pada masa Orde Baru, selain difokuskan terhadap pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan dan sarana fisik lainnya seperti pelabuhan, bandar udara dan jaringan telekomunikasi, pembangunan sektor ekonomi juga dikembangkan pada sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan dan perikanan.

Pemerintahan Gubernur Eddy Sabara 1967 - 1978

Pada awal pemerintahan Gubernur Eddy Sabara, fokus utama ditujukan pada sektor pertanian (Tamburaka, 2004). Hal ini dilakukan dengan tujuan menjadikan sektor pertanian sebagai basis ekonomi masyarakat. Pada periode kedua pemerintahannya, pembangunan difokuskan pada tata ruang dengan tujuan memanfaatkan lahan tidur guna meningkatkan hasil produksi pertanian di Sulawesi Tenggara. Selain itu, pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, telekomunikasi, pelabuhan, dan bandar udara juga menjadi perhatian utama (Abadi & Hayat, 2014). Selanjutnya, pengembangan sektor ekonomi seperti pertanian, perkebunan, perikanan laut dan darat, peternakan, dan kehutanan. Dalam arti luas, program pengembangan sektor pertanian telah menaruh perhatian pada kebijakan perikanan. Meskipun masih dalam arti luas dan termasuk ke dalam program sektor pertanian, era pemerintahan Gubernur Eddy Sabara telah menunjukkan perhatian pada pengembangan sektor perikanan.

Pemerintahan Gubernur Abdullah Silondae 1978 - 1981

Gubernur Drs. Abdullah Silondae diangkat berdasarkan Keputusan Presiden No. PEM/7/18/39 tanggal 19 Juni 1978, dan dilantik pada tanggal 23 Juni 1978 oleh Menko Polkam Jenderal M. Pangabean, Gubernur Abdullah Silondae adalah salah satu Tim Konseptor Penyusunan Rancangan Perencanaan Program Pembangunan Daerah Sultra dengan program “Pemanfaatan Tanah dan Air” pada Pelita I dan Pelita II. Fokus kebijakan Gubernur Abdullah Silondae yaitu peningkatan produksi hasil pertanian yang didukung oleh peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pembangunan infrastruktur wilayah. Pengembangan sektor pertanian tersebut yaitu dengan program pengembangan pertanian unggulan yang terdiri dari lima komoditas unggulan: kopi, kelapa, kakao, kapas dan kedelai. Lima jenis produk tersebut memiliki nilai tambah dan harga yang cukup baik di pasar domestik saat itu. Di samping 5 produk di atas, produk pertanian lainnya, termasuk perikanan tangkap dan perikanan darat dalam upaya memenuhi kebutuhan lokal juga dikembangkan.

Pemerintahan Gubernur Alala 1982 - 1987 1987 – 1992

Upaya maksimal yang dilakukan oleh gubernur sebelumnya belum mencapai target yang ditentukan serta belum bisa mengatasi masalah-masalah yang dihadapi sesuai dengan yang diharapkan. Untuk itu, pada masa pemerintahan Gubernur Alala, strategi yang dilakukan adalah dengan membuat strategi pembangunan dengan model pembangunan yang disebut Gerakan Desa Makmur Merata (GERSAMATA). Program ini disesuaikan dengan pendekatan pembangunan dalam Repelita yang merupakan pendekatan sektoral dengan menitikberatkan pada pembangunan ekonomi. Implementasi dari GERSAMATA ini memiliki 5 sasaran utama, yaitu : peningkatan produksi pertanian dalam arti luas; peningkatan sarana dan prasarana fisik, ekonomi dan sosial; pengembangan dan penerapan teknologi pedesaan; peningkatan kualitas hidup; peningkatan kualitas sumber daya manusia pedesaan. GERSAMATA berfokus pada komoditas pertanian yang berorientasi pada pasar seperti kedele, kakao, kapas, bunga matahari, jamu mete, lada dan cengkeh. Sektor perikanan yaitu, pengembangan budidaya udang dan perikanan tangkap.

Pemerintahan Gubernur Laode Kaimoeddin 1992 - 1997 1997 - 2003

Era pemerintahan Gubernur Laode Kaimoeddin terdiri dari dua periode, yaitu Orde Baru dan Orde Reformasi. Di era kepemimpinan Gubernur Laode Kaimoeddin, terjadi pergantian rezim pemerintahan dimana rezim Orde Baru runtuh dan digantikan oleh reformasi. Era pemerintahan Gubernur Kaimoeddin, saat krisis moneter memberikan dampak positif terhadap pendapatan petani. Melemahnya nilai rupiah terhadap dolar Amerika, dari Rp2.500 per 1 US\$ melonjak menjadi Rp20.000 per 1 US\$, menjadikan pendapatan petani cengkeh, kakao, serta petambak udang mengalami kenaikan berlipat ganda. Strategi yang dilakukan pada periode satu pemerintahannya adalah dengan strategi pertumbuhan pusat dan subpusat pertumbuhan antarpusat yang terbagi: pusat pertumbuhan terdapat pada ibu kota provinsi, dan subpusat pertumbuhan terdapat pada wilayah kabupaten. Subpertumbuhan ini berfungsi sebagai pusat produksi hasil pertanian dan perikanan serta olahan masyarakat, dan wilayah pusat pertumbuhan berfungsi sebagai pusat pengembangan yang disebut juga sebagai kota-kota pasar yang bertujuan untuk distribusi dan pemasaran hasil-hasil produksi dari subpertumbuhan. Pada periode kedua masa

pemerintahan Gubernur Laode Kaimoeddin, program periode pertama masih dilanjutkan dengan mempertajam program melalui implementasi ekonomi kerakyatan lima sehat empat sempurna. Kebijakan lima sehat tersebut adalah pengentasan kemiskinan, peningkatan daya serap wilayah, penciptaan lapangan kerja, peningkatan kualitas sumber daya manusia, peningkatan penghayatan dan pengamalan sikap disiplin. Dan empat sempurna yaitu : pelaku ekonomi dan pemerintah dalam aktivitasnya menciptakan nilai tambah; perlu inovasi dan terobosan untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi; keberanian dan tanggung jawab.

Kebijakan Perikanan Gubernur Sulawesi Tenggara era Reformasi

Dampak dari krisis ekonomi dan moneter yang melanda Indonesia sejak tahun 1998 memengaruhi perekonomian di wilayah Sulawesi Tenggara. Kondisi ini menyebabkan jumlah penduduk miskin dan pengangguran terbuka relatif masih tinggi, tingkat kesejahteraan masyarakat relatif rendah. Bila diukur dengan indikator pendapatan per kapita, pendapatan rata-rata per kapita Sulawesi Tenggara hanya separuh dari pendapatan per kapita nasional. Dengan upaya yang dilakukan oleh beberapa gubernur di Sulawesi Tenggara di era reformasi, perlahan pertumbuhan ekonomi sedikit demi sedikit makin meningkat. Hal ini tidak terlepas dari program-program kerja para gubernur yang menjabat di era reformasi tersebut.

Pemerintahan Gubernur Ali Mazi 2003 - 2006 2007 - 2008

Kebijakan atau program yang tertuang dalam Visi dan Misi pembangunan jangka panjang yang diusung Gubernur Ali Mazi. SH adalah Sultra Raya 2020, yaitu terwujudnya kehidupan masyarakat yang sejahtera, adil dan merata, aman dan demokratis, serta maju dan berkembang pada tahun 2020. Salah satu programnya dikenal dengan istilah Program pemberdayaan ekonomi rakyat melalui Stelsel Masyarakat Sejahtera (SMS) yang diarahkan pada peningkatan kegiatan sosial ekonomi masyarakat secara swadaya, pendidikan alternatif, kesehatan masyarakat, teknologi tepat guna, kependudukan dan keluarga sakinah, lingkungan hidup, sosial budaya dan spiritualisme. Kebijakan perikanan di era alimazi bersinergi dengan kebijakan Stelsel Masyarakat Sejahtera (SMS) dan fokus pada pertumbuhan dan peningkatan produksi perikanan pada sektor unggulan perikanan seperti pengembangan budidaya rumput laut, produksi dan olahan hasil perikanan.

Pemerintahan Gubernur Nur Alam 2008 - 2013 2013 - 2017

Era atau masa pemerintahan Gubernur Nur Alam memiliki visi mewujudkan Sulawesi Tenggara yang sejahtera, yang akan terwujud melalui MEMBANGUN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT (BAHTRAMAS). Program utama dari visi tersebut adalah berpusat pada sektor pendidikan, kesehatan dan pembangunan wilayah pedesaan. Peluang investasi adalah pengelolaan dari beberapa komoditas andalan Sulawesi Tenggara, salah satunya pada sektor kelautan dan perikanan, yaitu industri pengolahan rumput laut dan industri makanan dari bahan baku ikan.

Pemerintahan Gubernur Ali Mazi 2018 – sekarang

Masa pemerintahan Alimazi periode kedua, diarahkan kepada pengebagan infratraktur, hilirisasi pertambangan, peningkatan sekotr unggulan tanaman pangan dan penanggulangan bencana dan adaptasi perubahan iklim dengan peningkatan ketahanan kawasan rawan bencana serta pemulihan pasca bencana yang berbasis kearifan lokal dan peningkatan investasi mitigasi dan pengurangan resiko bencana; peningkatan kualitas lingkungan hidup dengan penaggulangan pencemaran serta kerusakan lingkungan hidup dengan penguatan kelembagaan dan penegakan hukum bidang lingkungan hidup dan pemulihan ekonomi Sulawesi Tenggara pasca pandemi Covid-19; serta Revisi Tata Ruang Pulau Sulawesi. Visi pembangunan adalah terwujudnya Sultra yang aman, maju, sejahtera dan bermartabat. Kebijakan tersebut diimplementasikan dalam visi kebijakan Gubernur Ali Mazi dengan Gerakan Pembangunan Terpadu Wilayah Daratan dan Lautan-Kepulauan (Gerbarata). Seperti halnya pada era Gubernur Nur Alam, pada pemerintahan Ali Mazi, kebijakan perikanan melalui Gerbarata masih fokus pada pengembangan industri perikanan unggulan seperti industri rumput laut, tambak udang, dan rencana pembangunan industri pengalengan ikan. Pendekatan pembangunan industri perikanan dalam mendukung program pemerintah daerah untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat pesisir di Sulawesi Tenggara harus memprioritaskan penerapan prinsip pengelolaan sumber daya perikanan yang berkelanjutan. Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara telah mengeluarkan regulasi atau kebijakan yang diatur dalam Peraturan Gubernur atau Pergub Nomor 36 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Akses Area Perikanan (PAAP). Kebijakan ini bertujuan mendorong masyarakat untuk aktif mengelola kawasan perikanan mereka sendiri serta memiliki kawasan konservasi

sebagai salah satu langkah dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan perikanan berkelanjutan yang didasarkan pada prinsip-prinsip kelestarian lingkungan. Pada era pemerintahan Gubernur Ali Mazi, penerapan prinsip-prinsip perikanan berkelanjutan digulirkan dengan dukungan kebijakan berupa Pergub serta dimasukkan dalam dokumen perencanaan daerah dan diintegrasikan dalam Rencana Aksi Daerah Pengelolaan Akses Area Perikanan (RAD PAAP). Selanjutnya, melalui Pergub No. 39 Tahun 2021, Provinsi Sulawesi Tenggara telah memiliki dokumen RAD untuk Sustainable Development Goals (SDGs) 2018-2023.

Kebijakan Perikanan Berkelanjutan di Propinsi Sulawesi Tenggara

Propinsi Sulawesi Tenggara adalah wilayah yang memiliki perairan yang cukup luas, dengan wilayah daratannya. Sebagai provinsi kepulauan, Sulawesi Tenggara (Sultra) mempunyai luas perairan laut sekitar $\pm 114.879 \text{ km}^2$ atau 70% dari luas total wilayahnya. Sebagian besar masyarakatnya tinggal di kawasan pesisir. Bahkan dari total jumlah penduduk, 2,7 juta jiwa, ada sekitar 73.473 orang atau 2,8 % dari total penduduk Sultra bermata pencaharian sebagai nelayan, serta sekitar 97 % dari total jumlah nelayan Sultra merupakan nelayan perikanan skala kecil yang menggunakan perahu ukuran lebih kecil dari 10 gross ton (<10 GT) (Sara *et al.*, 2023). Dengan luas wilayah perairan yang signifikan dan potensi perikanan yang besar, diperlukan upaya perlindungan dan pelestarian untuk memastikan sumber daya perikanan tetap berkelanjutan. Tantangan perikanan yang dihadapi saat ini di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara adalah penurunan hasil tangkapan nelayan yang disebabkan oleh penangkapan berlebihan, pencemaran laut, praktik penangkapan ikan yang merusak seperti penggunaan bom dan potasium, serta dampak dari kebijakan tertentu. Oleh karena itu, berbagai upaya telah dilakukan untuk mengatasi persoalan tersebut. Berdasarkan Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, Pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk menetapkan peraturan daerah dan peraturan lainnya guna melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan, sesuai dengan Undang-Undang No 31 tahun 2004 dan Undang-Undang nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang 31 tahun 2004 tentang perikanan, yang mencakup eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan laut dalam batas wilayahnya dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam, menetapkan kewajiban Pemerintah Daerah untuk memberikan ruang dan akses kepada nelayan kecil dalam Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-

Pulau Kecil (RZWP-3-K), Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara telah menginisiasi program Pengelolaan Akses Area Perikanan (PAAP) sebagai pendekatan pengelolaan perikanan yang berkelanjutan. Melalui PAAP ini, kelompok nelayan skala kecil diberikan akses untuk memanfaatkan, menjaga, dan ikut terlibat dalam pengelolaan wilayah laut dan sumber daya perikanan di dalamnya. Program ini diatur dalam Peraturan Gubernur No. 36 Tahun 2019 tentang PAAP dan diintegrasikan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara 2018-2023. PAAP juga disebutkan sebagai instrumen pengelolaan ruang laut yang diprioritaskan untuk nelayan kecil, nelayan lokal, nelayan tradisional, dan masyarakat adat seperti termuat dalam Perda Sultra No.9 Tahun 2018 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K) Sulawesi Tenggara. Pengintegrasian PAAP ke dalam dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), Rencana Strategis (Renstra), dan Dokumen Rencana Kerja (Renja) tahunannya pada tahap perencanaan dilakukan oleh Bappeda Provinsi Sultra dan menggandeng pihak perguruan tinggi dan Rare sebagai NGO untuk sama-sama merumuskan RAD PAAP dan diimplementasikan ke dalam RJPMD Sultra 2018-2023 dan pada RPJP Provinsi tahun 2024-2028. Pada tahap operasional telah dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Sulawesi Tenggara. Namun, diperlukan upaya lebih intensif agar proses integrasi terhadap program PAAP dapat berlangsung secara sistematis baik di tingkat provinsi sampai pada level kabupaten/kota sampai pada level atau tingkat kecamatan dan desa, agar implementasi kebijakan lebih efektif dan manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat, khususnya masyarakat yang tinggal di kawasan pesisir yang mengandalkan laut sebagai tempat mencari penghidupan, serta menjamin agar sumber daya perikanan tetap berkelanjutan dan tetap dirasakan manfaatnya oleh generasi selanjutnya.

KESIMPULAN

Tinjauan historis kebijakan pengelolaan perikanan skala kecil di Provinsi Sulawesi Tenggara mencerminkan transformasi dari masa Orde Lama hingga Era Reformasi. Pada masa Orde Lama, kendala politik, ekonomi, dan keuangan mempengaruhi implementasi kebijakan di sektor perikanan. Pemerintahan Orde Baru lebih berfokus pada pembangunan ekonomi, termasuk sektor perikanan. Pada Era Reformasi, fokus beralih ke pertumbuhan dan produksi perikanan, dengan investasi dalam industri unggulan seperti rumput laut dan pengolahan hasil perikanan. Pemerintah Daerah

Provinsi Sulawesi Tenggara juga menerbitkan regulasi, termasuk Peraturan Gubernur Nomor 36 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Akses Area Perikanan (PAAP), untuk mendorong partisipasi masyarakat dan kesadaran terhadap konservasi lingkungan.

PERSANTUNAN

Terima kasih kepada semua pihak-pihak yang telah membantu dan berkontribusi dalam penulisan jurnal ini.

DAFTAR PUSTAKA

- ANRI. 2007. Citra Sulawesi Tenggara dalam arsip. Jakarta, Arsip Nasional Republik Indonesia.
- Adrianto, L. (2005). Valuasi ekonomi sumberdaya pulau-pulau kecil. Working Paper. Bogor: Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan - Institut Pertanian Bogor. Bogor, ID: PKSPL-IPB.
- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional [BAPPENAS]. (2014). Kajian Strategi Pengelolaan Perikanan Berkelanjutan. Direktorat Kelautan dan Perikanan, Kementerian PPN/BAPPENAS. Jakarta.
- Bene, C., & Tewfik, A. (2001). Fishing effort allocation and fishermen's decisions making process in a multi species smallscale fishery: Analysis of The Conch and Lobster Fishery in Turks and Caicos Island. *Human Ecology*, 157-186.
- Bene, C., Macfayden, G., & Allison, E. H. (2007). Increasing the contribution of small-scale fisheries to poverty alleviation and food security. *FAO Fisheries Technical Paper*. Rome: FAO.
- Cunningham, S. (1993). Fishermen's incomes and fisheries management. *Research Paper No 61*. PortsMouth: CEMARE.
- Dahuri, R. (2002). Kebijakan dan program pengembangan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan. Bogor. Pusat Kajian Studi Pesisir dan Lautan.
- Fauzi, A. (2010). *Ekonomi perikanan : Teori, Kebijakan dan Pengelolaan*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka.
- Gian, A., & Akim. (2020). Kebijakan uar Negeri Indonesia terhadap World Trade Organization dalam Negosiasi Pembentukan Aturan Subsidi

- Perikanan. Padjadjaran Journal of International Relations (PADJIR), 2(1), 18-33. doi: 10.24198/padjir.v2i1.22247. e-ISSN: 2684-8082.
- Hidayat. (2013). Peningkatan kapasitas kelembagaan nelayan. *Jurnal Sejarah Citra Lekha*, Vol. XVII (1), 43-58.
- Kusdiantoro, Achmad Fahrudin, Sugeng Hari Wisudo & Bambang Juanda (2019). Kinerja Pembangunan Perikanan Tangkap di Indonesia. *Buletin Ilmiah Marina Sosial Ekonomi Kelautan Dan Perikanan*. 69-84. DOI: <http://dx.doi.org/10.15578/marina.v5i2.8053>.
- Kusdiantoro, Achmad Fahrudin, Sugeng Hari Wisudo & Bambang Juanda (2020). Strategi kebijakan pembangunan perikanan tangkap berkelanjutan. *Economic and Social of Fisheries and Marine Journal*. 07(02): 131-141. DOI: <http://dx.doi.org/10.21776/ub.ecsofim.2020.007.02.01>
- Machena, N., & Kwaramba, R. (1997). The creation of property right to promote sustainable development in lake kariba inshore fishery in Zimbabwe In K Remane (Ed). *African Inland Fisheries. Aquaculture and The Environment*, 245-254.
- Mudzakir, A. K. (2011). Juridical study and history of collection fisheries management in ZEE. oai:generic.eprints.org:35265/core379.
- Nurlina, (2018). Analisis keterkaitan sub sektor perikanan dengan sektor lain pada perekonomian di Provinsi Aceh. *Jurnal Samudra Ekonomika*, Vol. 2, (1). 20-29.
- Pinkerton, E. (2015). Neoliberalism and the politics of enclosure in north american small-scale fisheries. *Marine Policy*, 61, 303-312. <https://doi.org/10.1016/j.marpol.2015.03.025>
- Purwatia, M. Y., Sugiyanto, & Marjono. (2017). Socio-economic changes in fishing communities of the village of Kedungrejo, Sub-district Muncar, Banyuwangi, 2000-2015. *Historica*, 1(1), ISSN 2252-4673.
- Raazy, A. F., Idrus, R., & Demmalino, E. B. (2023). Recommendations for effective co-management model of small-scale grouper (Serranidae) Fishery in South Sulawesi Province. *Torani: JFMarSci*, Vol. 6(2), 86-101. DOI:10.35911/torani.v6i2.24605
- Sara, L., Haslianti., Mansyur, A., Alimina, N., Annaastasia, N., Jali, W., Erawan, M. T. F., Mangurana, W. O. I, & Wahyudi, A. I. (2023). Membentuk generasi peduli wilayah pesisir dan laut melalui bina desa dan gerakan bulan cinta laut, Desa Batu Putih, Sulawesi Tenggara, Indonesia. *Jurnal Pengabdian Magister Pendidikan IPA*, 6(1) DOI : <https://doi.org/10.29303/jpmipi.v6i1.3046>.
- Tamburaka. R.E. (2004). Sejarah Sulawesi Tenggara dan 40 Tahun Sultra Membangun. *Hasil Penelitian*. Unhalu Kendari
- Vatria, B. (2021). Pembangunan perikanan skala kecil melalui pendekatan mata pencaharian berkelanjutan. *Jurnal Vokasi*, Vol. XVI(2), hal. 45-58.
- Widodo, S. K. (2011). Dinamika kebijakan tentang perikanan dan transformasi budaya nelayan Pantai Utara Jawa. *Sabda*, 6(1), 30-39. ISSN 1410-7910.